

**LAPORAN TAHUNAN  
PENGELOLAAN PPID BKKBN PUSAT TAHUN 2019**



**BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**2019**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

#### **a. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di BKKBN**

Dalam UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Keadaan ini dipertegas lagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara Negara, Badan Publik lainnya serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Eksistensi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat

waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan, BKKBN wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

BKKBN dalam hal ini sangat mendukung terhadap Keterbukaan Informasi publik dan sebagai wujud pernyataan patuh terhadap UU KIP maka BKKBN mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan BKKBN. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan peraturan Kepala BKKBN Nomor : 136/PER/D2/2011 Tentang Pengelolaan Informasi Publik BKKBN. Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 163/PER/D2/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BKKBN. Instruksi Kepala BKKBN Nomor : 167/INS/D2/2011 tentang Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan BKKBN Provinsi. Serta Keputusan Kepala BKKBN Nomor : 70/KEP/G5/2012 tentang Informasi yang dikecualikan dilingkungan BKKBN. Kepka No.69/KEP/G5/2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan Informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas Informasi Panduan bagi Petugas Informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah disusun PPID BKKBN Pusat, antara lain sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengolahan Informasi Publik, Nomor SOP : 3721/I/TI.403/G5/2013.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Informasi Publik , Nomor SOP 3722/I/TI.403/G5/2013
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik , Nomor SOP 3723/I/TI.403/G5/2013

## **b. Gambaran umum Pelayanan Informasi Publik BKKBN Tahun 2018**

### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

### **2. Layanan Permohonan Informasi Publik**

Setiap permohonan informasi yang diajukan dilingkungan BKKBN dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID BKKBN Pusat dan mengisi Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan, akan diteruskan kepada unit Direktorat. Biro dan atau unit eselon II yang terkait dengan informasi yang diminta, jawaban atas permohonan Pengajuan Informasi akan dijawab melalui surat atau mengambil langsung di Pelayanan PPID, kami memberi batas waktu untuk jawaban pemohon informasi selama 7 hari kerja dan diberikan tambahan waktu selama 7 hari kerja apabila jawaban itu masih dalam proses jawaban.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID BKKBN menyediakan ruang/loket meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, mesin foto copy atau scan, kursi tunggu, buku tamu pemohon informasi dan formulir permohonan informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket meja layanan informasi tersebut. Adapun pemohon informasi yang melalui surat bisa dialamatkan langsung ke PPID BKKBN c/q. Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (DITTIFDOK) di Lantai Dasar (Ruang Perpustakaan) Gedung Halim 2, Jalan Permata No.1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650, atau bisa mengunjungi Website BKKBN : [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id)

Fasilitas PPID Gambar 1 Tampilan Website *bkkbn.go.id*

The screenshot displays the homepage of the Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). At the top, there is a navigation bar with links for 'BERITA TERBARU', 'Dalam Pengelolaan Program KKBPK', 'BKKBN IKUTI LOMBA', 'PILIH BAHASA', and 'WEBMAIL'. The main header features the BKKBN logo and the organization's name. Below the header is a secondary navigation menu with categories like 'BERANDA', 'PROFIL', 'INFORMASI PUBLIK', 'BERITA', 'PUBLIKASI', 'KONSULTASI', 'TAUTAN', 'APLIKASI', and 'KONTAK'. The 'INFORMASI PUBLIK' section is expanded, listing various services such as 'Daftar Informasi Publik', 'Profil PPID BKKBN', 'Data dan Informasi', 'Kinerja BKKBN', 'Program dan Kegiatan', and 'Permohonan Informasi'. To the right, there are featured sections for 'PA ITU LANSIA?', 'HARGANAS XXVI', and 'REFORMASI BIROKRASI'. The bottom section contains news articles with titles like 'BKKBN DAN TNI BEKERJASAMA DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KOMITMEN SERTA KESERTAAN KB PRIA' and 'PENTINGNYA MENGENDALIKAN KUANTITAS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS'.

This image provides a detailed view of the 'INFORMASI PUBLIK' menu. The menu is organized into two columns. The left column lists the following items: 'Daftar Informasi Publik', 'Profil PPID BKKBN', 'Data dan Informasi', 'Kinerja BKKBN', 'Program dan Kegiatan', and 'Permohonan Informasi'. Below these items is a circular diagram with icons representing different aspects of the organization's work. The right column lists: 'PA ITU LANSIA?', 'Profil PPID', 'Regulasi PPID BKKBN', 'Maklumat Pelayanan', 'Standar Layanan', 'Jumlah Permintaan Informasi', 'Prosedur Permohonan Informasi', 'Permohonan Informasi Publik', 'Tata Cara Memperoleh Informasi Publik', 'Tata Cara Pengajuan Keberatan', 'Hak dan Kewajiban Badan Publik', and 'Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi'. At the bottom, there are tabs for 'BERITA' and 'PROVINSI'.



Beranda > Halaman > Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

### INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

#### A. Informasi yang Berkaitan Dengan Prodi BKKBN

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili bersebuta semua meliputi, meliputi wilayah, matriks dan fungsi tugas dan tanggung jawab institusi yang info di bawah ini:

- a. Struktur BKKBN [view](#)
- b. Alamat BKKBN [view](#)
- c. War Area BKKBN [view](#)
- d. Tugas, Pokok dan Fungsi BKKBN [view](#)
- e. Nilai dan Logo BKKBN [view](#)

2. Struktur Organisasi, gambaran umum rencana pembangunan masa, amli organisasional struktur:

- a. Struktur Organisasi [view](#)
- b. Prodi Ekono I [view](#)
- c. Prodi Ekono II [view](#)
- d. Prodi Ekono III [view](#)
- e. LIRKBN [view](#)

#### B. Rangkaian informasi mengenai program atau kegiatan yang sedang dijalankan

1. Tahap, jadwal, tujuan program dan kegiatan

- a. Rencana Strategis (RESTRAT) [view](#)
- b. Rencana Kerja (RENJA) [view](#)
- c. Program Kerja [view](#)

2. Anggaran Program dan Kegiatan meliputi sumber dan jumlah

- a. Daftar dan Pelaksanaan Anggaran (DPA) [view](#)
- b. RKAKL [view](#)
- c. Kajian Anggaran Kerja (KAK) [view](#)

3. Aspek Penting terkait Pelaksanaan tugas (KAKEN)

- a. Hari Keluarga Nasional [view](#)

4. Informasi tentang Pemantauan atau Pegawai pemantau penduduk

- a. Informasi CPNE [view](#)
- b. Sistem Pemantauan Terpadu (SMPN) [view](#)

#### C. Rangkaian informasi tentang kinerja yang ada berupa hasil dan realisasi kegiatan yang telah mendapat funding pinjaman beserta capaian/nya

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) [view](#)

#### D. Rangkaian Laporan Keuangan

- 1. Neraca [view](#)
- 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) [view](#)
- 3. Laporan Arus Kas [view](#)
- 4. Laba [view](#)
- 5. Laporan Arus Kas [view](#)

#### E. Rangkaian Laporan Akasi Informasi Publik

F. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakan yang meliputi ketentuan, ketentuan, atau petunjuk yang diterbitkan oleh BKKBN

G. Informasi tentang Hak dan Data Dasar masyarakat informasi Publik, Tata Cara pengajuan Informasi, serta proses pemrosesan sebagai informasi publik berkedudukan publik atau yang bertanggung jawab yang dapat diungkap

- 1. Tata Cara Menerima Informasi Publik [view](#)
- 2. Tata Cara Pengajuan Informasi dan Penyelesaian Keluhan [view](#)
- 3. Hak Pemohon Informasi [view](#)

H. Informasi tentang cara pelaksanaan dan/atau pelaksanaan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh unit Pelaksana BKKBN mengenai etika yang menyangkut cara atau prosedur kerja dengan menggunakan Kode Etik BKKBN

- 1. Peraturan Masyarakat (DMS) [view](#)
- 2. LAKIP [view](#)

I. Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa

- 1. Informasi mengenai prosedur pelaksanaan dan/atau pelaksanaan ini [view](#)

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Laporan Tahunan Pengelolaan PPID BKKBN ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan PPID BKKBN selama tahun 2019, sehingga akan menjadi acuan untuk pelayanan informasi yang lebih baik di tahun yang akan datang.

## **B. KEGIATAN DAN HASIL YANG DILAKSANAKAN PPID BKKBN TAHUN 2019**

### **1. Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi PPID BKKBN.**

Sumber Daya Manusia Pengelola Informasi PPID di BKKBN terdiri dari berbagai komponen yang berada di lingkungan BKKBN dan memberikan tugas kepada staf pengelola informasi komponen untuk memberikan informasi-informasi terbaru yang berhubungan dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan data-data lainnya yang dibutuhkan oleh PPID atau sesuai permintaan pemohon informasi. Adapun petugas jaga untuk Pelayanan Informasi di BKKBN adalah Pustakawan atau Pengelola Perpustakaan yang berada di lingkungan Unit Kerja Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi.

### **2. Tahun 2019 Komisi Informasi Pusat (KIP) melakukan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk tingkat Kementerian/Lembaga Pusat serta Pemerintah Daerah. Dalam kaitannya penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 KIP mengundang peserta yang terpilih untuk memberikan jawaban kuesioner dan melanjutkan ke Tahapan Presentasi Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2019 yang dilaksanakan bertempat Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat adapun penilaian materi dititikberatkan ke Komitmen, Kolaborasi dan Inovasi keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Badan Publik dalam melakukan Pelayanan Informasi Publik.**

Sesuai jadwal BKKBN memberikan presentasi Badan Publik pada hari ke dua yaitu pada tanggal 16 Oktober 2019 peserta pada sesi ketiga jam 15.30 s.d 18.00 WIB, yang dipresentasikan oleh Ibu Erna Puspitawati, SE sebagai Sekretaris PPID BKKBN Pusat, dalam sesi ketiga ini Badan Publik yang terdaftar di jadwal Presentasi diantaranya BKKBN, BPJS Kesehatan, BNPB, LPP RRI, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Komisi Yudisial.

Isi materi Presentasi yang disampaikan oleh BKKBN Pusat diantaranya :

- Struktur Organisasi
- Sinergitas pelayanan Informasi Publik dan Perpustakaan BKKBN
- Pembentukan Pusat Pelayanan Publik Program KKPBK pada tanggal 8 Oktober 2019
- Rencana Kerja tahun 2020

3. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID BKKBN Tahun 2019.

Selama Tahun 2019 PPID BKKBN tidak ada menerima permintaan informasi dari pemohon.

Daftar Rincian Pemohon Informasi Tahun 2019

Bulan	Jumlah Pemohon	Waktu rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Jumlah Permohonan yang ditolak	Ket
Januari	-	-	-	-	
Februari	-	-	-	-	
Maret	-	-	-	-	
April	-	-	-	-	
Mei	-	-	-	-	
Juni	-	-	-	-	
Juli	-	-	-	-	
Agustus	-	-	-	-	
September	-	-	-	-	
Oktober	-	-	-	-	
November	-	-	-	-	
Desember	-	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-	



4. Untuk meningkatkan pelayanan PPID BKKBN, pada akhir tahun 2019 PPID BKKBN menambah SOP Operasional Permohonan Informasi Publik.
5. Pada tahun 2019 rapat PPID dilaksanakan dengan mengundang komponen terkait dalam rangka mengevaluasi pengelolaan PPID dilingkungan BKKBN dan mengharapkan agar komponen lebih peduli akan pentingnya PPID di BKKBN. Masyarakat dapat mengetahui secara transparan kinerja dan apa saja kegiatan yang dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban Instansi kepada Pemerintah. Publik mendapatkan informasi melalui Web BKKBN, informasi yang disampaikan selama Th 2019 antara lain sebagai berikut :
  - Melengkapi dokumen serta data-data terkait kelengkapan PPID
  - Melengkapi data di web PPID dalam rangka penilaian dari KIP
  - Untuk kelengkapan informasi PPID, diharapkan masing-masing komponen juga dapat mengupload kegiatan strategis ke aplikasi CIS pada web BKKBN.

### **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam pengelolaan PPID BKKBN mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik antara lain sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit teknis di BKKBN;
2. Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelola layanan informasi di beberapa komponen belum memadai;
3. Pengelolaan layanan informasi di beberapa komponen belum dilaksanakan secara optimal.
4. Kepka No.69/KEP/G5/2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKKBN, agar dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh ASN BKKBN

Sedangkan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID BKKBN adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan dan pembinaan untuk 34 PPID Perwakilan Kantor BKKBN provinsi
- Membuat tautan pelayanan PPID dalam Website portal BKKBN Pusat dan Perwakilan Kantor BKKBN seluruh provinsi.
- Membuat jejaring antara Balai Diklat KKBPK dan Kantor Perwakilan dalam pengelolaan data dan informasi.

#### **D. PENUTUP**

Demikian Laporan Tahunan Pengelolaan PPID BKKBN Tahun 2019 secara ringkas, disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID BKKBN dengan harapan agar pelayanan informasi publik lebih baik lagi ditahun mendatang.

Plt. Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
BKKBN  
Ketua,

  
Drs. Rudy Budiman

## E. DOKUMENTASI



